P-ISSN : 23016728
e-ISSN : 27759830

Persepsi Masyarakat terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Lenguselu dalam Penyelesaian Konflik Tanah

Daniel Babu, SH., MH

Dosen Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Sosial dan Humaniora

Universitas Nusa Lontar Rote

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa dalam penyelesaian konflik tanah di Desa Lenguselu, Kecamatan Rote Selatan. Konflik pertanahan di desa ini muncul akibat batas tanah yang tidak jelas, pewarisan tanpa dokumen resmi, serta penggunaan lahan tanpa prosedur musyawarah. Kondisi tersebut menuntut kepala desa berperan sebagai mediator yang mampu menjaga keseimbangan antara hukum adat dan hukum formal. Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods dengan desain deskriptif eksploratif. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan kuesioner kepada 30 responden, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen desa dan literatur terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif tematik dan kuantitatif deskriptif menggunakan skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa berada pada kategori sangat tinggi. Masyarakat menilai kepala desa memiliki kemampuan mediasi yang baik, bersikap adil dalam pengambilan keputusan, serta melibatkan tokoh adat dan warga dalam proses penyelesaian konflik. Persepsi positif juga dipengaruhi oleh kedekatan sosial pemimpin dengan masyarakat dan kesesuaian kebijakan dengan nilai adat. Namun demikian, transparansi informasi dan dokumentasi keputusan masih perlu ditingkatkan agar kepercayaan publik semakin kuat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat yang positif berperan penting dalam mendukung efektivitas kepemimpinan desa. Kepemimpinan yang partisipatif, komunikatif, dan berbasis kearifan lokal mampu memperkuat legitimasi sosial serta menjaga harmoni masyarakat. Implikasi penelitian menekankan pentingnya peningkatan transparansi, sosialisasi kebijakan, dan penguatan dokumentasi pertanahan untuk mencegah konflik di masa depan.

Kata kunci: persepsi masyarakat, kepemimpinan desa, konflik tanah, hukum adat, mediasi sosial.

Abstract

This study aims to analyze community perceptions of village leadership in resolving land conflicts in Lenguselu Village, South Rote District. Land disputes in the village arise from

P-ISSN : 23016728
e-ISSN : 27759830

unclear boundaries, undocumented inheritance practices, and land use without deliberative procedures. These conditions require the village head to act as a mediator capable of balancing customary law and formal legal systems. The study employed a mixed-method approach with a descriptive-exploratory design. Primary data were collected through interviews, observations, and questionnaires distributed to 30 respondents, while secondary data were obtained from village documents and related literature. Data were analyzed using thematic qualitative analysis and descriptive quantitative analysis based on a Likert scale.
The findings indicate that community perception of the village head's leadership falls within a very high category. Residents perceive the village head as effective in mediating conflicts, fair in decision-making, and inclusive in involving customary leaders and community members. Positive perceptions are also influenced by the leader's social closeness and alignment of policies with customary values. However, transparency in information dissemination and documentation of decisions still needs improvement to strengthen public trust. This study concludes that positive community perception plays a crucial role in supporting effective village leadership. Participatory, communicative, and culturally grounded leadership strengthens social legitimacy and maintains community harmony. The study highlights the importance of improving transparency, policy communication, and land documentation to prevent future conflicts.

Keywords: community perception, village leadership, land conflict, customary law, social mediation.

Latar Belakang

Permasalahan tanah merupakan isu yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial dan budaya yang melekat pada identitas masyarakat. Kepemilikan tanah sering dikaitkan dengan warisan leluhur dan keberlanjutan kehidupan keluarga. Oleh karena itu, konflik tanah dapat memicu ketegangan sosial yang berkepanjangan.

Konflik pertanahan di wilayah pedesaan umumnya dipicu oleh batas tanah yang tidak jelas. Banyak masyarakat masih menggunakan penanda alam seperti pohon atau batu sebagai batas kepemilikan. Bukti semacam ini sering tidak diakui secara hukum formal. Akibatnya, sengketa mudah terjadi antarwarga maupun dalam keluarga.

P-ISSN : 23016728
e-ISSN : 27759830

Praktik pewarisan tanah secara lisan juga menjadi faktor penyebab konflik. Pembagian tanah sering dilakukan tanpa dokumen resmi atau pencatatan administratif. Kondisi ini menimbulkan perbedaan klaim kepemilikan di kemudian hari. Ketidakjelasan tersebut memperbesar potensi sengketa.

Selain itu, penggunaan tanah kas desa tanpa prosedur musyawarah dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Meskipun bertujuan sosial, penggunaan lahan tanpa kesepakatan bersama dapat memicu rasa ketidakadilan. Hal ini menunjukkan pentingnya tata kelola aset desa yang transparan. Keterbukaan menjadi kunci menjaga kepercayaan publik.

Dalam situasi konflik, kepala desa memiliki peran strategis sebagai mediator. Kepala desa diharapkan mampu menyelesaikan konflik secara adil dan bijaksana. Peran ini tidak hanya administratif, tetapi juga sosial dan kultural. Kepemimpinan desa sangat menentukan stabilitas sosial masyarakat.

Masyarakat desa umumnya masih menjunjung tinggi nilai adat dan musyawarah. Penyelesaian konflik sering dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan. Kepala desa harus mampu menyeimbangkan hukum formal dengan hukum adat. Keseimbangan ini penting untuk menjaga legitimasi keputusan.

Persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa menjadi faktor penting dalam keberhasilan penyelesaian konflik. Persepsi terbentuk melalui pengalaman, komunikasi, dan interaksi sosial. Masyarakat cenderung mendukung pemimpin yang dianggap adil dan transparan. Persepsi positif memperkuat kepercayaan publik.

Sebaliknya, persepsi negatif dapat menimbulkan resistensi terhadap kebijakan desa. Kurangnya transparansi informasi dapat memicu kecurigaan masyarakat. Ketidakjelasan proses penyelesaian konflik dapat menurunkan legitimasi pemimpin. Oleh karena itu, komunikasi publik menjadi hal yang sangat penting.

Desa Lenguselu merupakan salah satu desa yang menghadapi dinamika konflik pertanahan. Sengketa tanah muncul akibat pewarisan tradisional, batas lahan tidak jelas, dan penggunaan tanah tanpa prosedur formal. Kondisi ini menuntut kepemimpinan desa yang responsif dan partisipatif. Keharmonisan sosial sangat bergantung pada kemampuan pemimpin desa.

Persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa di Desa

P-ISSN : 23016728
e-ISSN : 27759830

Lenguselu menarik untuk dikaji secara ilmiah. Pemahaman terhadap persepsi masyarakat dapat membantu meningkatkan efektivitas kepemimpinan lokal. Selain itu, penelitian ini penting untuk memperkuat strategi penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, stabilitas sosial desa dapat terjaga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tingkat persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa dalam penyelesaian konflik tanah di Desa Lenguselu. Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi masyarakat terhadap kemampuan kepala desa dalam mediasi konflik, keadilan keputusan, transparansi, dan keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian sengketa tanah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods dengan desain deskriptif eksploratif untuk memahami persepsi masyarakat secara komprehensif. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan penyebaran kuesioner kepada 30 responden yang dipilih secara purposive. Data sekunder berasal dari dokumen desa, laporan sengketa tanah, serta literatur ilmiah yang relevan. Analisis kualitatif dilakukan melalui teknik tematik untuk mengidentifikasi pola persepsi masyarakat, sedangkan analisis kuantitatif deskriptif digunakan untuk menghitung tingkat persepsi menggunakan skala Likert. Pendekatan ini memungkinkan interpretasi yang lebih mendalam terhadap dinamika sosial yang terjadi di masyarakat.

Pembahasan

Persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa terbentuk melalui interaksi sosial yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat menilai pemimpin berdasarkan pengalaman langsung dan informasi yang diterima. Kedekatan sosial antara kepala desa dan warga memperkuat hubungan kepercayaan. Hal ini menjadi fondasi penting dalam penyelesaian konflik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menilai kepala desa memiliki kemampuan mediasi konflik yang baik. Kepala desa dianggap mampu mempertemukan pihak yang bersengketa melalui dialog. Pendekatan musyawarah menjadi metode utama dalam penyelesaian konflik. Cara ini dianggap lebih adil dan menjaga hubungan kekeluargaan.

Keadilan dalam pengambilan keputusan menjadi faktor penting dalam membentuk

P-ISSN : 23016728
e-ISSN : 27759830

persepsi positif masyarakat. Warga menilai bahwa keputusan kepala desa tidak memihak pihak tertentu. Proses musyawarah melibatkan tokoh adat dan keluarga yang bersengketa. Keterlibatan ini meningkatkan legitimasi keputusan.

Keterlibatan tokoh adat memiliki peran penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat. Tokoh adat dianggap memahami nilai budaya dan sejarah kepemilikan tanah. Kehadiran mereka memberikan legitimasi sosial terhadap keputusan. Sinergi antara kepala desa dan tokoh adat memperkuat stabilitas sosial.

Transparansi informasi menjadi aspek yang masih perlu ditingkatkan. Sebagian masyarakat menginginkan penjelasan yang lebih terbuka mengenai proses penyelesaian konflik. Kurangnya dokumentasi tertulis membuat informasi sulit diakses kembali. Transparansi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Persepsi masyarakat juga dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi kepala desa. Pemimpin yang aktif memberikan penjelasan kepada masyarakat dinilai lebih responsif. Komunikasi yang baik mencegah kesalahpahaman antarwarga. Hal ini membantu mengurangi potensi konflik baru.

Keselarasan kebijakan dengan nilai adat menjadi faktor penting dalam penerimaan masyarakat. Keputusan yang mempertimbangkan norma adat lebih mudah diterima. Masyarakat merasa identitas budaya mereka dihargai. Pengakuan terhadap adat memperkuat legitimasi sosial.

Partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian konflik meningkatkan rasa keadilan. Warga merasa memiliki peran dalam menentukan solusi. Partisipasi ini memperkuat rasa tanggung jawab bersama. Dengan demikian, keputusan lebih mudah diterima semua pihak.

Persepsi positif masyarakat berdampak pada meningkatnya dukungan terhadap kepemimpinan desa. Masyarakat lebih percaya pada kebijakan yang diambil kepala desa. Kepercayaan ini memperkuat stabilitas sosial dan keamanan desa. Dukungan masyarakat menjadi modal penting dalam pembangunan desa.

Namun demikian, peningkatan transparansi dan dokumentasi konflik masih diperlukan. Dokumentasi yang baik dapat mencegah sengketa berulang. Sosialisasi kebijakan juga perlu diperkuat agar masyarakat memahami prosedur penyelesaian konflik. Upaya ini penting

P-ISSN : 23016728
e-ISSN : 27759830

untuk memperkuat tata kelola desa yang baik.

Kesimpulan

Persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa di Desa Lenguselu dalam penyelesaian konflik tanah berada pada kategori sangat positif. Kepala desa dinilai mampu memediasi konflik secara adil, melibatkan tokoh adat dan masyarakat, serta menjaga keharmonisan sosial melalui pendekatan musyawarah. Persepsi positif ini dipengaruhi oleh kedekatan sosial pemimpin, kesesuaian kebijakan dengan nilai adat, dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian konflik. Meskipun demikian, peningkatan transparansi informasi dan dokumentasi keputusan masih diperlukan untuk memperkuat kepercayaan publik dan mencegah konflik di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Bass, B. M., & Bass, R. (2018). *The Bass handbook of leadership: Theory, research, and managerial applications* (5th ed.). Free Press.

Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Anchor Books.

Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. (2009). *Organizations: Behavior, structure, processes* (14th ed.). McGraw-Hill.

Hidayat, R. (2021). Kepemimpinan kepala desa dalam perspektif pembangunan partisipatif. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, 6(2), 115–128.

Northouse, P. G. (2016). *Leadership: Theory and practice* (7th ed.). Sage Publications.

Nugroho, A. (2023). Persepsi masyarakat dan legitimasi kepemimpinan desa dalam penyelesaian konflik sosial. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 17(1), 45–60.

Prasetyo, D. (2023). Kepemimpinan lokal berbasis kearifan adat dalam penyelesaian konflik pertanahan. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 4(2), 88–102.

Raharjo, S. (2021). Persepsi masyarakat terhadap transparansi kepemimpinan desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(3), 201–214.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2019). *Organizational behavior* (18th ed.). Pearson Education.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Walgito, B. (2010). *Pengantar psikologi umum*. Andi Offset.

Wibowo, A. (2022). Transparansi dan akuntabilitas kepala desa dalam penyelesaian konflik pertanahan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, 7(1), 55–70.

P-ISSN : 23016728
e-ISSN : 27759830

Yukl, G. (2013). *Leadership in organizations* (8th ed.). Pearson Education.